

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Stakeholder Theory*.

*Stakeholder theory* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap memiliki *power* sebagai bagian dari masyarakat dan dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Dalam pandangan *stakeholder theory*, perusahaan memiliki *stakeholder*, bukan sekedar shareholder (Riahi-Belkaoui, 2003). *Stakeholder theory* juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tujuan, tindakan organisasi dan kebijakan perusahaan itu sendiri diantaranya membatasi pemakaian pemakaian sumber ekonomi (modal dan tenaga kerja), kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola perbedaan kepentingan tersebut karena perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*, sehingga perusahaan dapat menjaga eksistensi pada lingkungan bisnisnya.

Dalam konteks ini para *stakeholder* mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dari

pendapat diatas, *stakeholder theory* menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tidak hanya mencakup pemegang saham, karyawan, direksi, pemerintah, tetapi juga anggota masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dampak harapan dari kelompok *stakeholder* yang berbeda menjadi bahan pertimbangan atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan merupakan suatu tanggung jawab dari manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok *stakeholder*. Oleh karena itu, manajemen diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting bagi para *stakeholder* dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut melalui pengungkapan informasi untuk mengelola *stakeholder* yang kuat agar mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

### **2.1.2 Teori Agensi**

Teori agensi mendasari hubungan antara agen dan prinsipal. Manajemen (agen) mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan, serta memberikan informasi cukup kepada *stakeholder* (prinsipal). Sedangkan prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. *Stakeholder* itu sendiri adalah pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja serta informasi yang mendukung prospek perusahaan di masa yang akan datang. Teori keagenan juga memberikan penjelasan mengenai

pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui laporan tahunan perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bagaimana asimetri informasi terjadi di dalam suatu perusahaan. Asimetri informasi ini sangat merugikan bagi pihak *stakeholders*, oleh karena itu para *stakeholder* memerlukan suatu alat kontrol untuk dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi. Alat kontrol yang dapat digunakan oleh *stakeholders* adalah informasi yang berupa pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan. Dengan pengungkapan sukarela yang lebih luas, maka akan memberikan informasi yang lebih transparan terutama bagi pemegang saham sebagai pemilik, dimana informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

### **2.1.3 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai kondisi finansial suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, dengan melakukan analisis atau interpretasi terhadap catatan informasi tersebut kita dapat mendeskripsikan kondisi finansial dari perusahaan bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

### **2.1.3.1 Pihak-Pihak Pemakai Laporan Keuangan**

Catatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, masyarakat dan manajemen perusahaan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:

a. Investor

Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang bisa terjadi, sehingga mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

b. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

c. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pihak ini tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

e. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan.

f. Pemerintah serta Lembaga-Lembaganya

Mereka yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

g. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

#### h. Manajemen Perusahaan

Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan. Informasi ini membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

#### **2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

#### 2.1.4 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Hendriksen (2002) mengatakan secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*). Prayogi (2003) mengatakan bahwa secara sederhana pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Artinya semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi yang mungkin akan didapat oleh pengguna laporan keuangan terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan.

Konsep pengungkapan yang digunakan oleh Harahap, 2002:89), yaitu :

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*), konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Pengungkapan Wajar (*Fair disclosure*), tujuan etis adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Pengungkapan Penuh (*Full disclosure*), Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak

menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan.

Peraturan mengenai laporan tahunan perusahaan yang *go public* diatur jelas dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa laporan tahunan emiten dan publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tersebut menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

#### **2.1.5 Luas Pengungkapan Sukarela (Luas *Voluntary Disclosure*)**

Informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Di Indonesia pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten

atau bagi perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal (BAPEPAM).

Prayogi (2003) mengatakan bahwa perusahaan dituntut oleh para investor, pelanggan, pemerintah, dan publik untuk membuat laporan tentang kinerja perusahaan lebih dari sekedar menyajikan informasi kinerja keuangan. Banyak perusahaan sudah menambahkan informasi laporannya dengan memasukkan informasi atas kinerja keuangan dan non keuangan yang mencakup aspek-aspek operasional mereka dalam perspektif stakeholders, pemasok dan pelanggan (Waterhouse dan Spenden, 1998 dalam Prayogi, 2003). Perusahaan dapat dengan leluasa melakukan pengungkapan sukarela sesuai dengan kepentingan perusahaan yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna laporan tahunan.

Pengungkapan sukarela dapat menambah kelengkapan informasi dalam memahami kegiatan operasional perusahaan publik dan menunjukkan adanya ketransparanan keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap pengguna laporan keuangan. Healy dan Palepu (1993) dalam Prayogi (2003) mengatakan bahwa pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan.

Prayogi (2003) mengatakan bahwa pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan cenderung mengungkapkan informasi sukarela apabila

manfaat yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan informasi sukarela tersebut lebih besar dari biaya (Prayogi, 2003). Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditor memahami resiko investasi.

Menurut Belkaoui (2004) tujuan dilakukannya pengungkapan ada lima, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
- b. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
- c. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
- d. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
- e. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.

Manajer memiliki informasi lengkap mengenai kinerja dan finansial perusahaan saat ini dan pada masa mendatang dibandingkan dengan pihak eksternal, namun manajer memiliki beberapa pertimbangan untuk melakukan pengungkapan tersebut. Manajer untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan

informasi lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengungkapan tersebut.

### **2.1.6 Karakteristik Perusahaan**

Kebijakan penyajian pengungkapan laporan secara sukarela pada perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perusahaan. Dilihat dari aspek laporan keuangan karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (structure), kinerja (performance) dan pasar (market) (Lang dan Lundholm, 1993 dalam Hardiningsih, 2008). Struktur meliputi ukuran (size) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau leverage. Kinerja mencakup likuiditas perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan pasar ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif berupa tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan (publik atau non-publik). Pendekatan pasar dapat juga dilihat secara kuantitatif yang meliputi total penjualan ekspor, ukuran perusahaan (total aktiva) dan total utang, termasuk juga proporsi pemegang saham dan umur perusahaan.

#### **2.1.6.1 Tingkat Leverage**

Leverage mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek, atau kenaikan bila mengalami likuidasi. Semakin besar leverage perusahaan, semakin besar pula kemungkinan transfer kemakmuran kepada pemegang saham dan manajer (Meek *et al*, 1995 dalam Yularto dan Chariri, 2003). Oleh karena itu

perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Na'im dan Rakhman (2000) bahwa perusahaan dengan resiko hutang atas modal yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio hutang yang lebih rendah.

Tingkat *leverage* yang tinggi juga dapat menimbulkan keraguan bagi para investor maupun calon investor dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan tersebut, karena sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pastinya akan digunakan untuk membiayai kewajiban sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Dengan demikian perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih mengenai mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban perusahaan.

#### **2.1.6.2 Tingkat Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan berupa keuntungan (profit) yang dihasilkan pada tingkat penjualan, asset, investasi dan modal saham. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio profit margin, return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Singhvi dan Desai (1972) dalam Rakhmawati et al, (2007) telah

mengidentifikasi profit margin dan earning return sebagai variabel yang berhubungan secara positive terhadap luas pengungkapan perusahaan. Pemikiran tersebut didasari bahwa profitabilitas yang tinggi menjadi pertimbangan pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas karena pihak manajemen merasa bahwa pengungkapan informasi tentang profitabilitas perusahaan merupakan kabar baik bagi investor, sehingga dengan informasi tersebut dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik.

Pendapat diatas juga sejalan dengan teori keagenan, karena manajemen dari perusahaan yang berprofit tinggi akan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti menjamin kestabilan posisinya dan meningkatkan kompensasi mereka. Apabila perusahaan dapat mencapai rasio profitabilitas yang tinggi, maka akan memicu pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sehingga mengurangi resiko adanya pandangan yang negatif dari pasar. Perusahaan yang mencapai profitabilitas tinggi menggunakan informasi untuk menghindari penurunan harga saham.

### **2.1.6.3 Ukuran Perusahaan**

Penelitian terdahulu telah banyak menguji hubungan antara tingkat pengungkapan laporan perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positive antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan (Hossain dan Hammami, 2009).

Pasar cenderung lebih banyak menyukai entitas yang di miliki oleh perusahaan besar, sehingga manajemen akan lebih banyak mengungkapkan informasi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindari resiko (Prayogi, 2003). Besar-kecil ukuran perusahaan dapat dilihat dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, karena aset yang dimiliki suatu perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk dapat melakukan kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan suatu output.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Kategori ukuran perusahaan yaitu:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1Milyar/tahun.

Ada tiga alternatif proksi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukuran perusahaan, yaitu melalui ukuran aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (market capitalized). Total aktiva lebih mencerminkan ukuran perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh Fitriani (2001) dalam Sri dan Sawitri (2011) bahwa total aktiva lebih menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar.

### **2.1.7 Komite Audit**

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut Tjager dkk (2003) dalam Purwati (2006) komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama *transparansi* dan *disclousure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Manfaat Komite Audit yang dibentuk sebagai sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite Audit meliputi : memilih auditor independen, mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Bapepam (2000) juga menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan lainnya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.

#### **2.1.7.1 Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Destika (2011) menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (prinsipal) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi *monitoring* pada komite audit terhadap pihak manajemen. Keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Keputusan ketua BAPEPAM Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal, untuk itu komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Perusahaan di Indonesia khususnya yang terdaftar di BEI juga harus memiliki komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan.

#### **2.1.7.2 Independensi Komite Audit**

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Independensi disini adalah bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terikat dengan pihak internal dari perusahaan tersebut. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

#### **2.1.7.3 Aktivitas Komite Audit**

Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya

adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di BEJ (Bursa Efek Jakarta) untuk memiliki komite audit.

Adanya independensi dan keahlian keuangan yang baik akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan (rapat). Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Komite audit dapat melakukan rapat dengan berbagai pihak seperti rapat komite audit dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal maupun pihak manajemen. Setidaknya setiap tahun komite audit yang diwakili oleh ketua komite audit akan menyampaikan laporan tahunan mereka kepada dewan komisaris. Pertemuan efektif komite audit yang dilaksanakan secara teratur dan lebih sering dapat meningkatkan transparansi laba yang dilaporkan, sehingga manajemen yakin untuk melaporkan laporan keuangannya. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi laporan keuangannya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu, baik penelitian yang dilakukan di luar negeri ataupun yang dilakukan di Indonesia tentang luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Baik yang bersifat wajib maupun sukarela antara lain:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teknik Analisis	Hasil
1.	Yularto dan Chariri (2003)	status perusahaan, besar asset, rasio leverage, rasio likuiditas, persentase pemegang saham, reputasi KAP, dan umur perusahaan	luas pengungkapan sukarela	Regresi Linier Berganda	Status perusahaan, besar asset, reputasi kantor dan umur perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan rasio leverage, rasio likuiditas dan persentase pemegang saham tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
2.	Simanjuntak dan widiastuti (2004)	Leverage, likuiditas, profitabilitas, dan porsi saham publik, dan umur perusahaan	Kelengkapan Pengungkapan	Regresi Linier Berganda	Leverage, likuiditas, profitabilitas, porsi saham public, dan umur perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Secara parsial Leverage, profitabilitas, dan porsi saham publik mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

*Bersambung ke halaman berikutnya*

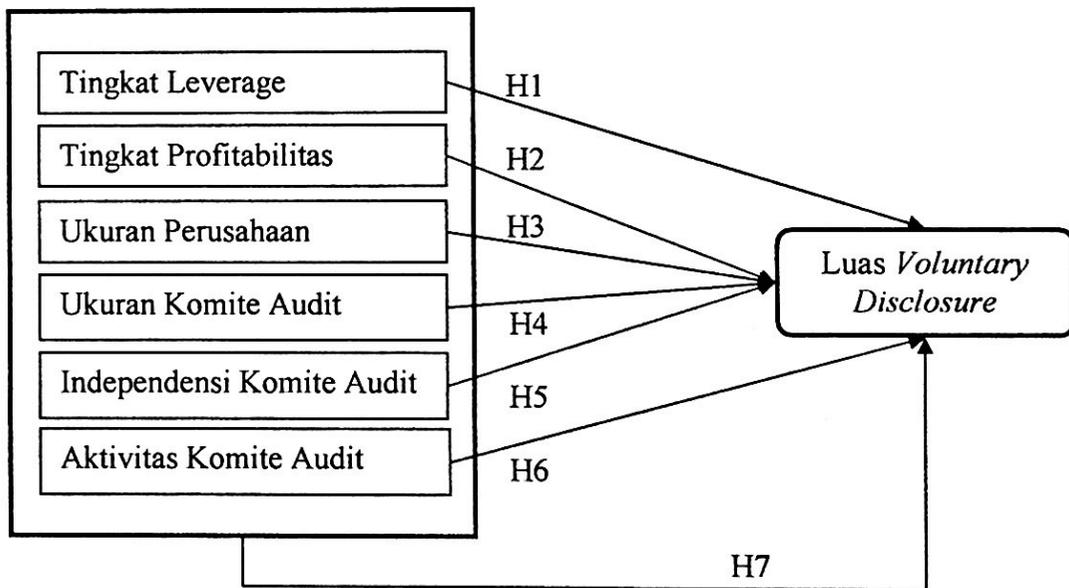
No	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teknik Analisis	Hasil
3.	Alsaeed (2006)	Ukuran perusahaan, leverage, disperse kepemilikan, umur perusahaan, profit margin, ROE, liuidita, jenis industri, dan ukuran KAP	Luas Pengungkapan Sukarela	Regresi Linier Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Leverage berhubungan tetapi tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan disperse, umur perusahaan, profit margin, ROE, likuiditas dan ukuran KAP tidak berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.
4.	Sudarmaji dan Sularto (2007)	Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe kepemilikan	Luas pengungkapan sukarela	Regresi Linier Berganda	Secara bersama-sama keempat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
5.	Hossain dan Hammami (2009)	umur, ukuran perusahaan, kompleksitas, profitabilitas, dan <i>aset-in-place</i>	Luas Pengungkapan Sukarela	Regresi Linier Berganda	umur, ukuran Perusahaan, kompleksitas, dan <i>aset-in-place</i> berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel profitabilitas ditemukan tidak signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.
6.	Mujiyono dan Nany (2010)	Leverage, saham publik, size, proporsi komite audit independen	Luas Pengungkapan Sukarela	Regresi Linier Berganda	Size berpengaruh positif signifikan dengan luas pengungkapan sukarela. Sedangkan leverage, saham publik dan komite audit independen ber-pengaruh negatif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel-variabel yang terdiri tingkat leverage, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran komite audit, independensi komite audit, dan aktivitas komite audit. Pengujian ini akan menguji luas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan pada bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Tingkat Leverage terhadap Luas *Voluntary Disclosure*.**

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan (Wulansari, 2007). Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, dapat menimbulkan keraguan akan kemampuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai leverage tinggi akan cenderung memberikan informasi yang lebih mengenai mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1 : *Tingkat leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas *Voluntary Disclosure*.**

Rasio profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba bersih yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan itu sendiri berasal dari pendapatan penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi mengenai profitabilitas perusahaan sangat diperlukan oleh *stakeholder* untuk mengawasi kinerja manajemen yang diungkapkan oleh perusahaan, karena melalui laporan tahunannya *stakeholder* dapat menganalisis dan menilai kelangsungan perusahaan tersebut. Apabila perusahaan dapat mencapai rasio profitabilitas yang tinggi, hal

ini akan memicu pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sehingga mengurangi resiko adanya pandangan yang negatif dari pasar. Perusahaan yang mencapai profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi yang luas untuk menghindari penurunan pasar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H2 : *Tingkat Profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas *Voluntary Disclosure*.**

Lang dan Lundholm (1993) dalam Benardi dkk. (2009) menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (publik demand) akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Wulansari (2008) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan dan makin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah :

H3 : *Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

#### **2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas *Voluntary Disclosure*.**

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat pada penelitian ini adalah :

H4 : *Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

#### **2.4.5 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Luas *Voluntary Disclosure***

Dengan kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Diperkirakan bahwa dengan adanya komite audit independen maka akan menambah kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Pengungkapan sukarela yang dilakukan manajemen akan ditingkatkan dengan adanya

independensi komite audit. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima pada penelitian ini adalah :

H5 : *Independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

#### **2.4.6 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Luas *Voluntary Disclosure*.**

Komite Audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Demikian juga fungsi dari komite audit termasuk didalamnya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap adanya kontrol internal yang lebih baik. Dengan semakin banyak frekuensi mengadakan rapat komite audit maka koordinasi komite audit dalam melakukan pengawasan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam pada penelitian ini adalah :

H6 : *Aktivitas komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*

**2.4.7 Pengaruh Tingkat leverage, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran komite audit, independensi komite audit, dan aktivitas komite audit terhadap luas *voluntary disclosure*.**

Berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini untuk menguji regresi secara serempak (simultan) adalah :

H7 : *Tingkat leverage, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran komite audit, independensi komite audit, dan aktivitas komite audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap luas voluntary disclosure.*